



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN



RENSTRA

Rencana Strategis (2025-2029)

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
(BBPP) BATANGKALUKU**



www.bbpp-batangkaluku.pertanian.go.id
email : infobbpp@pertanian.go.id
telp. 0411-866396, Fax 0411-866570



Jln Malino Km.3 Sungguminasa
Kab. Gowa - Sulawesi Selatan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Renstra BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Renstra Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian. Harapan kami, dokumen Renstra BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029 dapat menjadi acuan bersama dalam mencapai target kinerja Balai mendukung perwujudan visi misi BPPSDMP dan capaian visi misi Kementerian Pertanian.

Batangkaluku, 31 Desember 2025

Mengetahui
Kepala Balai



Dr. Ir. Jamaluddin Al Afgani, S.Pd., MP
NIP 197705012008011010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	3
1. Potensi	3
2. Permasalahan.....	3
3. Capaian Kinerja BBPP Batangkaluku 2020–2024	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN	14
A. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029	14
1. Visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029.....	14
2. Misi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029	14
3. Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029	16
B. Visi, Misi dan Tujuan BPPSDMP Tahun 2025–2029.....	16
1. Visi BPPSDMP Tahun 2025–2029	16
2. Misi BPPSDMP Tahun 2025–2029	17
3. Tujuan BPPSDMP Tahun 2025–2029.....	18
C. Visi dan Misi BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029	18
D. Sasaran Program BPPSDMP Tahun 2025–2029.....	20
E. Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2025–2029	21
F. Sasaran, Indikator Kinerja dan Tujuan Operasional BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029	21
G. Pohon Kinerja.....	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	30
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025–2029	30
B. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025–2029	32
C. Arah Kebijakan dan Strategi BBPP Batangkaluku	33
D. Kerangka Regulasi	38
E. Kerangka Kelembagaan.....	39
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	42
A. Target Kinerja.....	42
B. Kerangka Pendanaan	46
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja BBPP Batangkaluku Periode 2020–2024	11
Tabel 2. Target Indikator Sasaran Kegiatan BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029	24
Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029	43
Tabel 4. Target kinerja BBPP Batangkaluku tahun 2025–2029	44
Tabel 5. Kerangka Pendanaan Kegiatan BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi Pegawai BBPP Batangkaluku	5
Gambar 2. Pohon Kinerja BPPSDMP Tahun 2025–2029	26
Gambar 3. Kontribusi BBPP Batangkaluku pada Pohon Kinerja BPPSDMP Tahun 2025–2029	28
Gambar 4. Rumah Strategi Kementerian Pertanian	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sektor pertanian tetap berdiri kokoh sebagai pilar strategis pembangunan nasional yang tidak tergantikan. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menjamin kedaulatan pangan bagi lebih dari 284 juta jiwa penduduk merupakan refleksi dari ketangguhan sektor ini dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Melalui pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan, pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia komoditas, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan yang inklusif di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Transformasi sektor pertanian menuju era modernisasi memerlukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tulang punggung utama. Berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, mulai dari perubahan iklim ekstrem, perkembangan teknologi digital, kebutuhan regenerasi petani, hingga dinamika geopolitik global, menuntut insan pertanian untuk memiliki kompetensi yang unggul. Dalam hal ini, petani, penyuluh, dan praktisi pertanian perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang adaptif agar mampu mengelola sumber daya pertanian secara efektif dan kompetitif di pasar global.

Selaras dengan visi jangka panjang pemerintah, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2025–2029 telah menetapkan arah kebijakan untuk mewujudkan “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi besar ini ditopang oleh lima fondasi strategis, di mana salah satu pilar utamanya adalah penguatan “Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional yang Produktif”. Fondasi inilah yang menjadi landasan operasional dalam mencetak SDM pertanian yang berkualitas tinggi.

Tanggung jawab besar dalam membangun SDM dan kelembagaan pertanian secara nasional berada di bawah komando Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Melalui jaringan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi

pendidikan vokasi, pelatihan, penyuluhan, literasi, hingga fasilitasi kelembagaan petani. Upaya ini dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan setiap inovasi teknologi dapat teradopsi dengan baik hingga ke tingkat lapangan melalui tangan-tangan terampil insan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan). Sebagai lembaga pelatihan yang berkedudukan di wilayah strategis Sulawesi Selatan, BBPP Batangkaluku memegang mandat penting dalam menyelenggarakan pelatihan fungsional, teknis, dan profesi bagi aparatur maupun non-aparatur pertanian di wilayah kerjanya.

Mandat strategis yang diemban BBPP Batangkaluku berfokus pada penyiapan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan memiliki jiwa wirausaha (*entrepreneurship*). Melalui pengembangan model dan teknik pelatihan yang inovatif, balai ini berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap program pelatihan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian di wilayah timur Indonesia. Keberadaan balai ini menjadi instrumen kunci dalam mempercepat transfer teknologi dan modernisasi sistem pertanian.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kebijakan nasional, Renstra BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang komprehensif. Dokumen ini menjadi kompas organisasi dalam menjalankan program pelatihan pertanian yang terukur dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan proses transformasi SDM pertanian yang kompeten dan berdaya saing global dapat terakselerasi demi tercapainya kedaulatan pangan nasional yang kokoh.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Proses pembangunan SDM Pertanian perlu memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal sebagai dasar pijakan penyusunan kebijakan dan strategi. BBPP Batangkaluku menyelenggarakan fungsi antara lain: (i) Penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan kerja sama; (ii) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan; (iii) Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya; (iv) Pelaksanaan pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya; (v) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidangnya; (vi) Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi di bidangnya; (vii) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya; (viii) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya; (ix) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya; (x) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya; (xi) Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya; (xii) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional pelatihan teknis dan profesi, serta penyusunan model dan teknik pelatihan dibidangnya; (xiii) Pengelolaan unit inkubator agribisnis; (xiv) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya; (xv) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan pelatihan; (xvi) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; (xvii) Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan; dan (xviii) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.

2. Permasalahan

a. Kekuatan (*Strengths*)

BBPP Batangkaluku memiliki potensi dan permasalahan yang dijabarkan pada kekuatan dan kelemahan sebagai lingkungan strategis internal serta peluang dan ancaman/tantangan sebagai lingkungan strategis eksternal, kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku diantaranya:

- 1) BBPP Batangkaluku terletak pada lokasi strategis mudah diakses melalui transportasi darat, dan laut yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi karena berada di jalan poros Malino

- 2) Tenaga Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di BBPP Batangkaluku terdiri atas 122 orang (61 orang PNS, 7 orang CPNS, 51 orang PPPK, 2 orang PPPK Paruh Waktu, 1 orang Titipan Tugas) dan 31 orang Tenaga *Outsourcing*.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai adalah sebagai berikut:

- a) Lulusan S3 sebanyak 3 orang;
- b) Lulusan S2 sebanyak 28 orang;
- c) Lulusan S1/D4 sebanyak 64 orang;
- d) Lulusan D3 sebanyak 8 orang
- e) Lulusan SLTA sebanyak 45 orang;
- f) Lulusan SLTP sebanyak 2 orang; dan
- g) Lulusan SD sebanyak 3 orang.

Di antara 122 orang ASN BBPP Batangkaluku, terdapat 2 orang pejabat struktural, yaitu 1 orang Kepala Balai dan 1 orang Kepala Bagian Umum. Selain itu, terdapat 2 orang Ketua Kelompok Substansi dan 7 orang Ketua Tim Kerja.

BBPP Batangkaluku memiliki 49 orang pejabat fungsional, yang terdiri atas:

- a) Fungsional widyaiswara sebanyak 18 orang;
- b) Fungsional arsiparis sebanyak 3 orang;
- c) Fungsional pustakawan sebanyak 2 orang;
- d) Fungsional pranata komputer sebanyak 4 orang;
- e) Fungsional pranata hubungan masyarakat sebanyak 4 orang;
- f) Fungsional perencanaan sebanyak 8 orang;
- g) Fungsional analis sumber daya manusia aparatur sebanyak 3 orang;
- h) Fungsional analis pengelolaan keuangan APBN sebanyak 4 orang; dan

- i) Fungsional pranata keuangan APBN sebanyak 2 orang.
- j) Fungsional statistisi sebanyak 1 orang

Komposisi pegawai BBPP Batangkaluku berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan, baik ASN maupun tenaga *outsourcing*, disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Komposisi Pegawai BBPP Batangkaluku

- 3) Tenaga fungsional widyaiswara terdiri dari 4 (empat) kompetensi/bidang spesialisasi yaitu Penyuluhan dan Sosial Ekonomi Pertanian, Agroteknologi, Mekanisasi, serta Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian yang tersertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- 4) Tenaga penyelenggaraan pelatihan yang memiliki sertifikat *Management of Training* (MOT) dan *Training of Course* (TOC) oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- 5) Lokasi BBPP Batangkaluku strategis, mudah diakses oleh peserta dari berbagai wilayah Indonesia;
- 6) Berpengalaman menyelenggarakan pelatihan internasional\Seluruh pegawai yang berkomitmen tinggi dalam menjalankan tupoksi masing-masing sesuai janji layanan;
- 7) Sarana prasarana yang memadai untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan

BBPP Batangkaluku memiliki lahan yang telah bersertifikat dengan luas 115.131 m², yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, meliputi: Wisma, Asrama peserta, Ruang Makan, Ruang Kelas, Aula, dengan kapasitas asrama dan wisma sebanyak 244 orang, Poliklinik, Ruang *Display*, Koperasi, Jalan Kompleks, Lahan praktek, Saluran Irigasi, Gedung Kantor, Gedung Perpustakaan, Masjid, Sarana Olah Raga, Lapangan Parkir, Poliklinik, *Green House*, *Green Building*, Unit Pengolahan Pupuk Organik, Kumbung Jamur, Alat dan Mesin Pertanian, Alat Pengolahan Hasil Pertanian, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Tiga, Kendaraan Roda Dua, Laboratorium Perlindungan Tanaman dan Laboratorium Pangan, Gedung serbaguna dan lain-lain.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan BBPP Batangkaluku dalam mendukung program aksi BPPSDMP adalah:

- 1) Belum Optimalnya peran dan fungsi BBPP Batangkaluku sebagai lembaga pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Pertanian;
- 2) Belum meratanya kompetensi widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya;
- 3) Belum maksimalnya pengembangan profesionalisme bagi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
- 4) Peran dan fungsi unit inkubator agribisnis sebagai unit pembelajaran kewirausahaan pertanian masih membutuhkan pendampingan yang lebih intensif;
- 5) Kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian;
- 6) Cakupan pelatihan yang masih terbatas;
- 7) Metode yang masih cenderung seragam dan didominasi oleh pendekatan klasikal dan Evaluasi Pasca Pelatihan yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan mekanisme pendampingan di lapangan;

- 8) Kompetensi IT pegawai dari tiap-tiap bagian dalam rangka revolusi industry 4.0 belum merata;
- 9) Kompetensi Bahasa Inggris pegawai dari tiap-tiap bagian dalam rangka pelaksanaan pelatihan internasional belum merata;
- 10) Keterbatasan Pemanfaatan Pertanian Cerdas (*Smart Farming*); dan
- 11) Pola pelatihan *Competency-Based-Training* (CBT) belum dapat dilakukan secara utuh.

c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang BBPP Batangkaluku dalam mendukung program BPPSDMP, adalah:

- 1) Keberadaan program rekrutmen ASN tiap tahun oleh pemerintah sesuai dengan analisis jabatan;
- 2) Kebutuhan tenaga kerja (*job seeker*) dan pencipta lapangan kerja (*job creator*) sebagai mitra usaha yang tersertifikasi oleh perusahaan di sektor pertanian meningkat;
- 3) Ketersediaan program eselon I teknis yang selaras dengan tupoksi BBPP Batangkaluku dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian;
- 4) Ketersediaan program tugas belajar setiap tahun yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
- 5) Perkembangnya teknologi/digitalisasi di bidang pertanian;
- 6) Program-program Kementerian/Lembaga lain (lintas sektor) yang diarahkan pada pengembangan sektor pertanian;
- 7) Citra pertanian yang menjadi *leading sector* pertumbuhan ekonomi nasional;
- 8) Tingginya minat *stakeholder* dalam memanfaatkan sarana prasarana Balai;
- 9) Tingginya minat *stakeholder*/pelanggan yang bekerja sama dalam bidang pelatihan pertanian; dan
- 10) Peningkatan PNBP

d. Tantangan (*Threats*)

Tantangan BBPP Batangkaluku dalam mendukung program BPPSDMP, adalah:

- 1) Ketidakpastian Ekonomi global dan Geopolitik;
- 2) Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi;
- 3) Usia Petani dan Jumlah petani aktif mengalami penurunan;
- 4) Ketidakmerataan infrastruktur;
- 5) Kewenangan dan Program Tumpang Tindih;
- 6) Keterbatasan alokasi anggaran;
- 7) Munculnya berbagai lembaga pelatihan pertanian vokasi profesional berbasis online (*Skill Academy*, dll); dan
- 8) Munculnya berbagai macam platform media sosial yang memungkinkan belajar pertanian secara mandiri (*YouTube*, *group Facebook*, *Instagram* dll).

Lingkungan strategis internal ataupun eksternal tersebut di atas perlu dianalisis dengan teknik kekuatan-kelemahan-peluang-tantangan atau SWOT (*strengths-weaknesses-opportunities-threats*). Teknik ini berfungsi sebagai cara yang efektif untuk mengidentifikasi kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengambil keuntungan dari peluang yang tersedia, dan menentukan cara menghadapi ancaman yang ada, sehingga dapat memberikan kejelasan dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Hasil analisis SWOT tersebut, adalah:

a. Kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*Opportunities*)

Dari hasil identifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki BBPP Batangkaluku, disusun strategi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan lokasi strategis dan sarana prasarana pelatihan yang lengkap untuk memperluas kerja sama dengan *stakeholder* nasional dan internasional guna meningkatkan PNBPN serta mutu lulusan pelatihan yang tersertifikasi.

- 2) Memanfaatkan kompetensi Widyaiswara tersertifikasi BNSP dan pengalaman pelatihan internasional untuk mendukung program eselon I teknis dan program lintas kementerian dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian.
- 3) Menggunakan ketersediaan lahan praktik, laboratorium, dan unit pengolahan sebagai pusat pembelajaran vokasi dan kewirausahaan pertanian yang selaras dengan kebutuhan *job seeker* dan *job creator* sektor pertanian.
- 4) Mengembangkan program pelatihan berbasis teknologi pertanian dan digitalisasi dengan dukungan fasilitas balai.

b. Kelemahan (Weaknesses) dan Peluang (Opportunities)

Dari hasil identifikasi kelemahan dan peluang yang dimiliki BBPP Batangkaluku, disusun strategi sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan program tugas belajar dan rekrutmen ASN untuk meningkatkan pemerataan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan, khususnya di bidang IT, bahasa Inggris, dan *smart farming*.
- 2) Mengoptimalkan sinergi *stakeholder* untuk memperkuat peran unit inkubator agribisnis sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan pertanian.
- 3) Mengembangkan model pelatihan blended learning dan digital learning sebagai respon terhadap keterbatasan cakupan pelatihan dan metode yang masih dominan klasikal.

c. Kekuatan (*Strengths*) dan Tantangan (*Threats*)

Dari hasil identifikasi kekuatan dan tantangan yang dimiliki BBPP Batangkaluku, disusun strategi sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan SDM Widyaiswara tersertifikasi dan fasilitas pelatihan yang memadai untuk menghasilkan konten pelatihan yang kredibel dan aplikatif guna bersaing dengan lembaga pelatihan *online* dan media sosial.

- 2) Menggunakan pengalaman pelatihan internasional dan jaringan *stakeholder* untuk menjaga keberlanjutan program pelatihan di tengah keterbatasan anggaran dan ketidakpastian ekonomi global.
- 3) Menjadikan komitmen tinggi seluruh pegawai sebagai modal organisasi dalam menjaga kualitas layanan pelatihan.

d. Kelemahan (*Weaknesses*) dan Tantangan (*Threats*)

Dari hasil identifikasi kelemahan dan tantangan yang dimiliki BBPP Batangkaluku, disusun strategi sebagai berikut:

- 1) Melakukan reformasi metode pelatihan dari pendekatan klasikal menuju *Competency-Based Training* (CBT) yang terintegrasi dengan pendampingan lapangan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan di tengah keterbatasan anggaran.
- 2) Meningkatkan kompetensi IT dan digital *mindset* pegawai guna menghadapi disrupsi platform pembelajaran mandiri berbasis media sosial dan lembaga pelatihan online.
- 3) Memperkuat pelatihan kewirausahaan, magang, dan inkubasi bisnis pertanian guna mendukung kelembagaan petani dan meningkatkan minat generasi muda.
- 4) Mengintegrasikan evaluasi pasca pelatihan dengan mekanisme monitoring dan pendampingan untuk memastikan keberlanjutan dampak pelatihan di lapangan.

3. Capaian Kinerja BBPP Batangkaluku 2020–2024

Berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja pada sasaran kegiatan, yaitu (1) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya; (2) Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian; (3) Capaian Nilai Mandiri Zona Integritas BBPP Batangkaluku; dan (4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPP Batangkaluku, hasil evaluasi kinerja BBPP Batangkaluku selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja BBPP Batangkaluku Periode 2020–2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	98,85%	77,90%	80,35%	86,83%	96,33%
2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,46	3,92	3,93	3,94	4,15
3	Terwujudnya birokrasi BBPP Batangkaluku yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Mandiri Zona Integritas BBPP Batangkaluku	33,11	34,57	34,95	34,95	80,31
4	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Batangkaluku	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPP Batangkaluku	-	86,16	85,67	96,03	96,40

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK 1): Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian

Indikator : Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya

Salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Peningkatan kualitas SDM Pertanian menjadi fokus BPPSDMP melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan guna mendukung penyediaan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta peningkatan ekspor komoditas pertanian.

Pada tahun 2024, persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya mencapai 96,33%. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan vokasi pertanian berjalan efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pertanian sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Sasaran Kegiatan (SK 2): Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian

Indikator : Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian

Capaian indikator ini diukur melalui tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan di BBPP Batangkaluku. Pada tahun 2024, tingkat kepuasan peserta pelatihan mencapai nilai 4,15 pada skala Likert. Capaian ini melampaui target sebesar 3,94 dan menunjukkan bahwa kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan semakin baik, baik dari aspek materi, fasilitator, sarana prasarana, maupun pelayanan administrasi.

3. Sasaran Kegiatan (SK 3): Terwujudnya birokrasi BBPP Batangkaluku yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Indikator : Capaian Nilai Mandiri Zona Integritas BBPP Batangkaluku

Reformasi Birokrasi BBPP Batangkaluku diarahkan pada terwujudnya tata kelola yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Pada tahun 2024, Capaian Nilai Mandiri Zona Integritas BBPP Batangkaluku tercatat sebesar 80,31, sedangkan pada periode sebelumnya sebesar 34,25. Perbedaan nilai tersebut dipengaruhi oleh perubahan format dan mekanisme penilaian yang digunakan, sehingga hasil pengukuran tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya. Capaian ini tetap menggambarkan komitmen BBPP Batangkaluku dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan melihat hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BBPP Batangkaluku dengan memperhatikan nilai komponen perubahan reformasi birokrasi pada 6 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

4. Sasaran Kegiatan (SK 4) : Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Batangkaluku

Indikator : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2024, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 96,40. Capaian ini telah melampaui target sebesar 90,80 dan mencerminkan pengelolaan anggaran yang semakin efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN

A. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029

1. Visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah:

"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

2. Misi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kementerian Pertanian sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan kondisi dimana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

b. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas nasional, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

c. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- 1) Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
- 2) Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani; dan
- 3) Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT).

d. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia

Misi ini menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah *Monkeypox* (*Mpox*), Rabies, Antraks, Flu Burung dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisasi dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

e. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementerian Pertanian dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

3. Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029

Tujuan dipetakan berdasarkan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029. Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kesejahteraan Petani;
- b. Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas;
- c. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat;
- d. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Akibat dan Dampak Penyakit Hewan serta Penyakit Bawaan Pangan; dan
- e. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional.

B. Visi, Misi dan Tujuan BPPSDMP Tahun 2025–2029

1. Visi BPPSDMP Tahun 2025–2029

Visi BPPSDMP Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan Visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029. Rumusan ini menjadi arah strategis yang menegaskan peran BPPSDMP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Visi BPPSDMP adalah:

“Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045.”

Berdasarkan visi BPPSDMP Tahun 2025–2029 di atas, terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu SDM pertanian produktif, SDM pertanian maju, SDM pertanian mandiri dan SDM pertanian sejahtera. Keempat kata kunci tersebut menjelaskan *positioning* SDM pertanian sebagai aset untuk mewujudkan Visi

Kementerian Pertanian dan Visi Nasional. SDM sebagai aset merupakan perubahan paradigma pengelolaan SDM pertanian yang tidak memandang manusia sebagai faktor produksi namun sebagai modal penting dalam pembangunan pertanian ke depan.

Penjelasan dari masing-masing kata kunci dijabarkan lebih rinci sebagai berikut :

a. SDM Pertanian Produktif

Kata kunci pertama bermakna SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

b. SDM Pertanian Maju

Kata kunci kedua bermakna SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

c. SDM Pertanian Mandiri

Kata kunci ketiga bermakna SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha.

d. SDM Pertanian Sejahtera

Kata kunci keempat bermakna SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya.

2. Misi BPPSDMP Tahun 2025–2029

Untuk mewujudkan Visi BPPSDMP Tahun 2025–2029, dirumuskan misi yang akan menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama lima tahun ke depan.

- a. Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang;
- b. Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian; dan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional.

3. Tujuan BPPSDMP Tahun 2025–2029

- a. Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa;
- b. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani; dan
- c. Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional.

C. Visi dan Misi BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029

Dengan mengacu kepada visi Kementerian Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, maka BBPP Batangkaluku merumuskan *Visi* sebagai berikut :

“Menjadi lembaga pelatihan terpercaya dan berdaya saing untuk menghasilkan SDM pertanian yang kreatif, inovatif dan profesional.”

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Lembaga pelatihan terpercaya**, BBPP Batangkaluku berkomitmen menjadi lembaga yang mampu menyelenggarakan pelatihan pertanian secara konsisten, berkualitas, dan profesional. Kepercayaan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kompetensi peserta pelatihan/purnawidya, penerapan standar layanan yang jelas, serta sistem pelatihan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan komitmen pelayanan BBPP Batangkaluku dalam memberikan kepastian layanan pelatihan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan pengguna, serta berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM pertanian.
2. **Lembaga pelatihan yang berdaya saing**, BBPP Batangkaluku diarahkan untuk mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional melalui penguatan kurikulum, metode pembelajaran berbasis praktik, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak. Daya saing lembaga tercermin dari kemampuan menghasilkan lulusan pelatihan yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi perubahan serta tuntutan sektor pertanian modern.
3. **SDM pertanian yang kreatif**, merupakan SDM yang memiliki kemampuan berpikir terbuka, menghasilkan ide-ide baru, serta menemukan solusi

terhadap berbagai permasalahan pertanian. Kreativitas ini mendorong lahirnya inovasi dalam pengelolaan usaha tani, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pengembangan produk pertanian bernilai tambah.

4. **SDM pertanian yang inovatif**, adalah SDM yang mampu mengembangkan dan menerapkan teknologi, metode, maupun model bisnis pertanian yang lebih efektif dan efisien. Inovasi diwujudkan dalam proses produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian, sehingga meningkatkan daya saing produk pertanian dan kesejahteraan pelaku usaha tani.
5. **SDM pertanian yang profesional**, adalah SDM yang memiliki kompetensi teknis, sikap kerja, dan etika profesi yang tinggi. Profesionalisme tercermin dari kemampuan bekerja secara disiplin, bertanggung jawab, berorientasi pada mutu, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. SDM pertanian profesional diharapkan mampu menjadi pelaku utama pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan pasar.

Dengan visi tersebut, BBPP Batangkaluku diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM pertanian yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan sektor pertanian.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BBPP Batangkaluku menetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025–2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas program, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelatihan pertanian;
2. Mengembangkan jejaring kerja sama, dan sistem informasi pelatihan pertanian
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan pelatihan fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan pelatihan profesi dan pelaksanaan uji kompetensi bidang pertanian;
5. Mengembangkan model teknik pelatihan fungsional, teknis, agribisnis, kewirausahaan, dan mekanisasi pertanian;
6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pelatihan pertanian swadaya sebagai lembaga pelatihan pertanian di perdesaan;

7. Meningkatkan fungsi Inkubator Agribisnis sebagai media pembelajaran agribisnis; dan
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana teknis, administrasi dan manajemen BBPP.

D. Sasaran Program BPPSDMP Tahun 2025–2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Perumusan Sasaran Program BPPSDMP dilakukan melalui penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029.

Kontribusi BPPSDMP terhadap pertumbuhan usaha tani nasional diterjemahkan ke dalam Sasaran Program “Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.” Sasaran ini merepresentasikan peningkatan skala dan kapasitas pelaku usaha tani dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumber daya pendukung lainnya, yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dimaknai sebagai perubahan status usaha kelembagaan petani yang terverifikasi menunjukkan peningkatan kapasitas, kinerja, dan tata kelola sebagai hasil langsung intervensi kegiatan lingkup BPPSDMP. Peningkatan kelas tersebut mencerminkan usaha tani yang memiliki pendapatan lebih baik serta posisi bisnis yang semakin strategis dalam rantai nilai pertanian. Dalam konteks ini, sumber daya manusia pertanian menempati peran kunci sebagai pelaku usaha sekaligus aset utama dalam pengembangan inovasi dan bisnis pertanian, sehingga keberhasilan peningkatan kelas usaha tani sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang unggul, berjiwa kewirausahaan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

E. Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2025–2029

Kinerja BPPSDMP diterjemahkan menjadi 1 (satu) Sasaran Program (SP): “Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.” Capaian terhadap sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): “Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas.” Berdasarkan sasaran tersebut, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2025–2029 adalah:

1. SK 1. Meningkatnya kompetensi petani; IKSK 1.1 SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%).
2. SK 2. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan); IKSK 2.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur) (%); IKSK 2.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (non aparatur) (%).
3. SK 3. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan teknis pertanian (sesudah pelatihan); IKSK 3.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) (%); IKSK 3.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) (%).
4. SK 4. Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan; IKSK 4.1 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (Skala Likert 1 - 5).

F. Sasaran, Indikator Kinerja dan Tujuan Operasional BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029

1. Tujuan

Sejalan dengan tujuan BPPSDMP 2025–2029, BBPP Batangkaluku menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan;
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;
- c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian;

- d. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia pertanian;
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian pertanian;
- f. Memperkuat kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian;
- g. Memperkuat kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan penyiapan pencari kerja sektor pertanian;
- h. Memperkuat kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dan pekerja bidang pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi dan daya saing pertanian; dan
- i. Memperkuat kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian mendukung penguatan dan pengembangan penyuluhan/pedampingan petani dan korporasi petani.

2. Sasaran, Indikator Kinerja

Berdasarkan IKSP Pusat Pelatihan Pertanian yang ingin dicapai pada periode Tahun 2025–2029, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang ingin dicapai BBPP Batangkaluku pada periode Tahun 2025–2029, adalah :

1. SK 1. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan teknis pertanian (sesudah pelatihan); IKSK 1.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) (%); IKSK 1.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) (%).
2. SK 2. Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan; IKSK 2.1 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (Skala Likert 1 - 5).
3. SK 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Batangkaluku; IKSK 3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Batangkaluku (Nilai).
4. SK 4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Batangkaluku; IKSK 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Batangkaluku (Skala Likert 1 - 4).

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran kegiatan BBPP Batangkaluku. Target IKSK

BBPP Batangkaluku periode Tahun 2025–2029 secara lengkap ditampilkan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Target Indikator Sasaran Kegiatan BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029

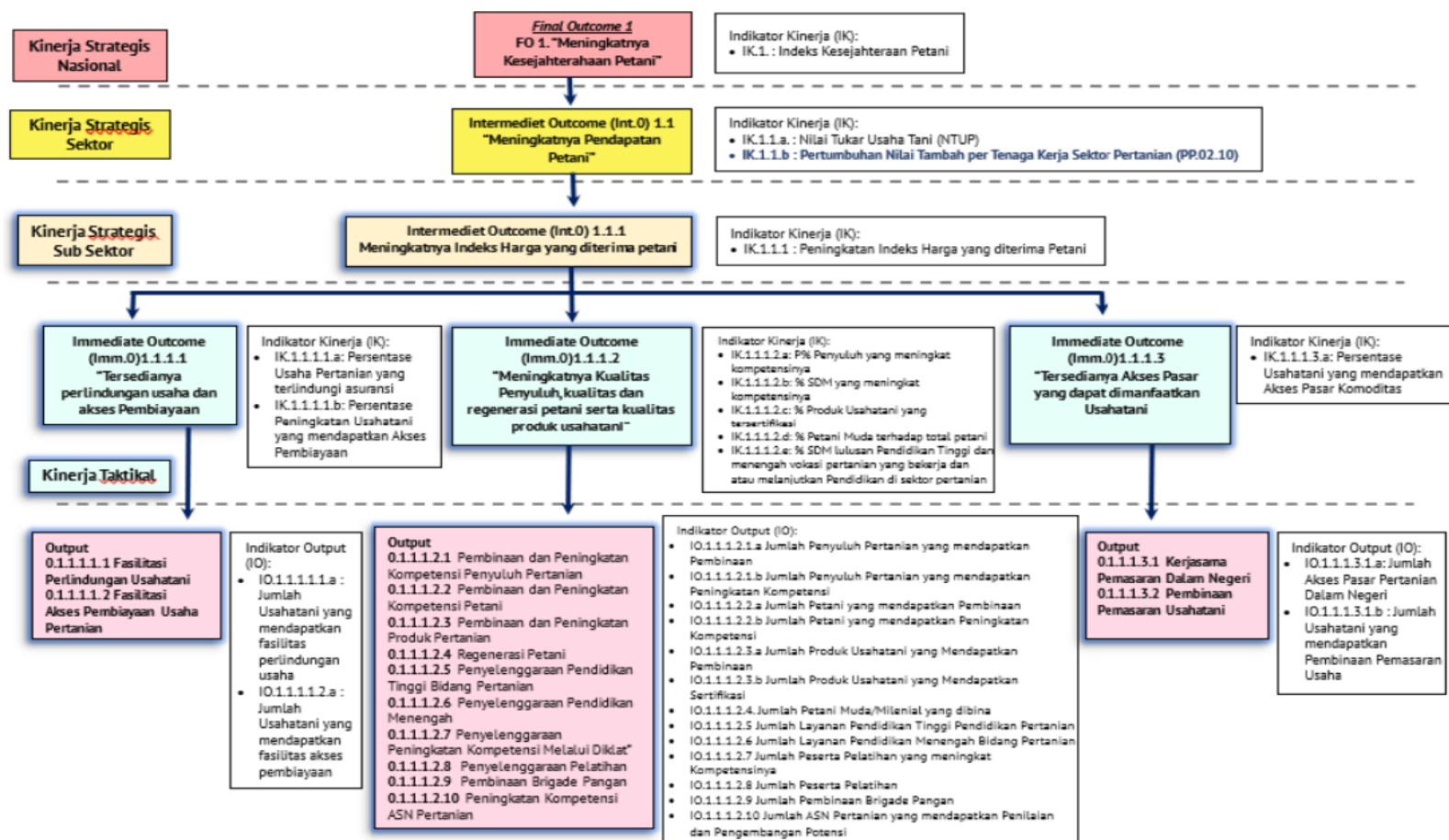
Sasaran kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan teknis pertanian (sesudah pelatihan)	1.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	%	20	18	16	14	12
		1.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	%	25	23	21	19	17
SK2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	2.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Skala Likert (1 - 5)	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
SK3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Batangkaluku	3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Batangkaluku	Nilai	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
SK4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Batangkaluku	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Batangkaluku	Skala likert (1 - 4)	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64

G. Pohon Kinerja

Kementerian Pertanian memiliki pohon kerja yang dibangun atas dasar lima *final outcome* yang menjadi tujuan pencapaian pembangunan dalam sektor pertanian, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani;
2. Terwujudnya kemandirian pangan asal pertanian;
3. Terwujudnya kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
4. Terwujudnya kedaulatan/ketahanan energi nasional; dan
5. Meningkatnya kesehatan masyarakat Indonesia

Berdasarkan pohon kinerja Kementerian Pertanian, BPPSDMP memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian *final outcome* 1, yaitu “Meningkatnya kesejahteraan petani.” Kesejahteraan petani dimaknai sebagai kondisi di mana petani mampu hidup layak serta memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Menurut BPS, kesejahteraan petani diukur secara multidimensi, meliputi aspek pendapatan dan penguasaan sumber daya, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, standar hidup layak, ketahanan pangan dan gizi, serta kemampuan mitigasi risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Adapun Pohon kinerja BPPSDMP adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Pohon Kinerja BPPSDMP Tahun 2025–2029

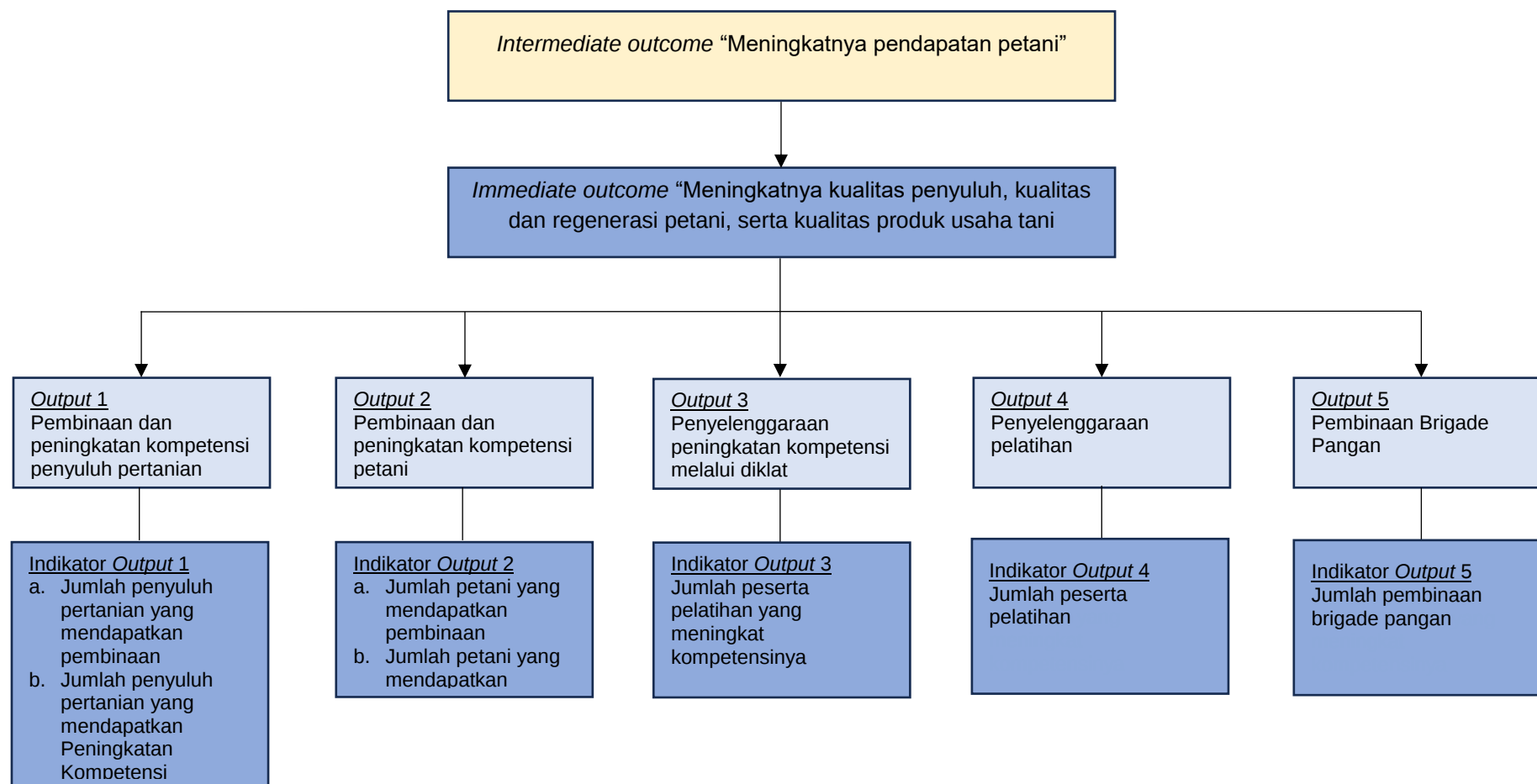
Dalam Renstra BPPSDMP Tahun 2025–2029, terdapat satu *intermediate outcome* “Meningkatnya pendapatan petani”. Dari satu *intermediate outcome* tersebut, diturunkan menjadi tiga *immediate outcome*, yaitu:

1. Tersedianya perlindungan usaha dan akses pembiayaan;
2. Meningkatnya kualitas penyuluh, kualitas dan regenerasi petani, serta kualitas produk usaha tani; dan
3. Tersedianya akses pasar yang dapat dimanfaatkan usaha tani.

Dari ketiga *immediate outcome* tersebut, BBPP Batangkaluku secara langsung berkontribusi pada *immediate outcome* 2 “Meningkatnya kualitas penyuluh, kualitas dan regenerasi petani, serta kualitas produk usaha tani”. Selanjutnya *immediate outcome* 2 tersebut dijabarkan ke dalam enam *output*, sebagai berikut:

1. *Output* 1: Pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian;
2. *Output* 2: Pembinaan dan peningkatan kompetensi petani;
3. *Output* 3: Penyelenggaraan peningkatan kompetensi melalui diklat;
4. *Output* 4: Penyelenggaraan pelatihan; dan
5. *Output* 5: Pembinaan Brigade Pangan.

Kontribusi ini menempatkan BBPP batangkaluku sebagai salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian *outcome* sektor pertanian.



Gambar 3. Kontribusi BBPP Batangkaluku pada Pohon Kinerja BPPSDMP Tahun 2025–2029

Pada Gambar 3 tersebut terlihat bahwa peningkatan kesejahteraan petani dicapai melalui *Intermediate Outcome* sektor berupa meningkatnya kualitas penyuluh pertanian dan petani, serta produk usaha tani. Intermediate outcome tersebut selanjutnya diturunkan pada level sub sektor menjadi meningkatnya kompetensi penyuluh pertanian dan petani.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025–2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029 dirancang untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pembangunan pertanian nasional dalam jangka menengah yang semakin kompleks, dinamis, dan mendesak untuk segera ditangani. Perumusan arah kebijakan dan strategi ini berlandaskan pada Rencana Teknokratik RPJMN 2025–2029 serta sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang memperoleh mandat rakyat, khususnya dalam aspek ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.



Gambar 4. Rumah Strategi Kementerian Pertanian

Kerangka arah kebijakan dan strategi dituangkan dalam Rumah Strategi Kementerian Pertanian ini menggambarkan keterkaitan antara visi, tujuan antara, pilar, dan fondasi yang membentuk satu kesatuan sistem pembangunan pertanian berkelanjutan, yaitu:

1. Pertumbuhan volume usaha pertanian;
2. Kemandirian pangan asal pertanian;
3. Pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi;
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan

5. Terjaganya kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular.

Kelima tujuan antara tersebut hanya dapat diwujudkan apabila delapan pilar utama pembangunan pertanian ditegakkan secara konsisten. Kedelapan pilar dimaksud adalah:

1. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan;
3. Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional untuk memperkuat rantai nilai;
4. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) sebagai basis Lumbung Pangan Nasional;
5. Perlindungan usaha dan peningkatan akses pembiayaan pertanian;
6. Pengawasan kepatuhan terhadap tata kelola pertanian berkelanjutan;
7. Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani yang tangguh dan berdaya saing; dan
8. Penguatan sistem kesehatan hewan nasional.

Tegaknya pilar-pilar pembangunan pertanian memerlukan fondasi yang kuat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, ditetapkan lima fondasi utama sebagai landasan dalam pembangunan pertanian 2025–2029, yaitu:

1. Sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan pertanian nasional yang produktif;
2. Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian untuk mendukung pelayanan publik yang efektif;
3. Standardisasi dan sertifikasi produk serta praktik pertanian;
4. Pemanfaatan teknologi pertanian modern dalam seluruh proses budidaya hingga pascapanen; dan
5. Tata kelola pertanian berkelanjutan yang mengacu pada *Good Agricultural Practices*, *Good Handling Practices*, *Good Farming Practices*, dan praktik baik lainnya.

Berdasarkan rumah strategi di atas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tahun 2025–2029. Terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi koridor implementasi 13 strategi jangka menengah Kementerian Pertanian. Implementasi strategi yang baik diharapkan dapat mewujudkan visi

“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia” di akhir periode perencanaan jangka menengah.

1. Arah Kebijakan 1 “Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.”
2. Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.”
3. Arah Kebijakan 3 “Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.”
4. Arah Kebijakan 4 “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia.”
5. Arah Kebijakan 5 “Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular.”
6. Arah Kebijakan 6 “Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.”

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025–2029

Dalam kerangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan arah kebijakan dan strategi yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan, serta tata kelola birokrasi yang profesional.

Arah kebijakan dan strategi tersebut diformulasikan untuk menjawab tantangan Pembangunan pertanian yang semakin kompleks, sekaligus memastikan keberlanjutan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang berdaya saing serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Arah kebijakan BPPSDMP ditetapkan pada dua pokok utama. Pertama, peningkatan pendapatan petani dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia. Kebijakan ini dioperasionisasikan melalui strategi: (1) regenerasi petani dan pengembangan usaha tani berbasis kompetensi melalui penyuluhan serta penguatan modal manusia (*human capital*) pertanian; dan (2) pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara di bidang pertanian, disertai peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional agar lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Kedua, penguatan tata kelola

birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi implementasi reformasi birokrasi BPPSDMP untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean governance* dalam setiap aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Arah kebijakan dan strategi tersebut menegaskan bahwa pembangunan SDM pertanian 2025–2029 tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas tenaga kerja pertanian, tetapi juga pada penguatan kualitas melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, serta perkembangan teknologi pertanian modern. Dalam kerangka ini, penyuluh pertanian diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan, sementara birokrasi yang bersih dan profesional menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.

BPPSDMP pada periode 2025–2029 berperan strategis sebagai penggerak utama dalam regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, dan penguatan tata kelola kelembagaan yang berintegritas. Peran tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional, khususnya peningkatan volume usaha pertanian dan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia.

C. Arah Kebijakan dan Strategi BBPP Batangkaluku

Arah kebijakan BBPP Batangkaluku sejalan dengan arah kebijakan BPPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian dalam mendukung kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2025-2029, yaitu:

1. Peningkatan daya saing BBPP Batangkaluku melalui: (i) Peningkatan sistem manajemen mutu; (ii) Pelaksanaan akreditasi lembaga dan program pelatihan; (iii) Pengembangan prasarana dan sarana BBPP Batangkaluku; (iv) Pengembangan pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja (SKK/SKKNI);
2. Peningkatan daya saing SDM BBPP Batangkaluku agar lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan, melalui pendidikan formal dan informal;

3. Pengembangan teknik dan metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sasaran;
4. Peningkatan jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi berdasarkan SKK/SKKNI;
5. Penguatan kelembagaan pertanian swadaya (P4S);
6. Pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan; dan
7. Penguatan tata kelola reformasi birokrasi BBPP Batangkaluku yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui strategi yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BBPP Batangkaluku periode tahun 2025-2029, yaitu :

1. Peningkatan daya saing BBPP Batangkaluku sebagai lembaga pelatihan terpercaya dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu
 - 1) Menerapkan proses bisnis BBPP Batangkaluku secara menyeluruh sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 2) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten dalam seluruh penyelenggaraan layanan pelatihan;
 - 3) Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 secara konsisten untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas; dan
 - 4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam penerapan sistem manajemen mutu dan budaya kerja berorientasi kualitas.
 - b. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga dan Program Pelatihan
 - 1) Memelihara dan mempertahankan akreditasi kelembagaan secara berkelanjutan sesuai standar lembaga akreditasi yang berlaku;
 - 2) Memelihara dan meningkatkan akreditasi program pelatihan melalui pemenuhan standar mutu penyelenggaraan pelatihan;
 - 3) Melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumen akreditasi secara berkala; dan

- 4) Menyiapkan dan mengembangkan program pelatihan baru yang memenuhi persyaratan akreditasi.
- c. Pengembangan Prasarana dan Sarana BBPP Batangkaluku
 - 1) Melaksanakan pemeliharaan, pengembangan dan modernisasi sarana prasarana pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan;
 - 2) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pelatihan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien;
 - 3) Menyusun dan menerapkan sistem pengelolaan serta pemeliharaan sarana prasarana secara berkala;
 - 4) Mengintegrasikan sarana prasarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi dan digitalisasi pelatihan;
 - 5) Penambahan alat dan mesin pertanian guna mendukung pelatihan di bidang mekanisasi pertanian; dan
- d. Pengembangan Pelatihan Berbasis Standar Kompetensi Kerja (SKK/SKKNI)
 - 1) Mengembangkan kurikulum dan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja (SKK/SKKNI) sesuai kebutuhan sektor pertanian.
 - 2) Menyusun dan memutakhirkan bahan ajar, modul, serta media pembelajaran berbasis kompetensi.
 - 3) Meningkatkan kompetensi widyaiswara/instruktur agar selaras dengan standar kompetensi yang diterapkan.
 - 4) Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan uji dan sertifikasi kompetensi.
 - 5) Memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk menjamin relevansi lulusan pelatihan.
2. Peningkatan daya saing SDM BBPP Batangkaluku dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas pengajar (widyaiswara) baik dalam bidang teknis, manajerial dan sosiokultural;

- b. Meningkatkan kapasitas tenaga pendukung pelatihan dalam bidang pelayanan pelatihan berbasis IT;
- 3. Pengembangan teknik dan metode pelatihan dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - a. Mendesain pelatihan sesuai dengan *Competency Based Training* (CBT), melalui upaya-upaya:
 - 1) Melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk memperoleh judul dan materi pelatihan yang memang dibutuhkan oleh penyuluh/petani/pelaku usaha di wilayah masing-masing;
 - 2) Melaksanakan identifikasi calon peserta calon lokasi untuk masing-masing pelatihan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan tepat sasaran;
 - 3) Menyusun kurikulum pelatihan sesuai dengan SKK/SKKNI dalam mendukung kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
 - 4) Melaksanakan pelatihan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelatihan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 171/Kpts.S.110/I/10/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pertanian;
 - 6) Melaksanakan evaluasi dampak pelatihan, minimal 1 tahun setelah pelatihan tersebut dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari pelatihan yang sudah dilaksanakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan/kesejahteraan purnawidya/alumni pelatihan terutama untuk purnawidya non aparatur/pelaku usaha;
 - 7) Melaksanakan pelatihan yang berbasis kompetensi dan dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi sesuai dengan SKK/SKKNI;
 - 8) Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi widyaiswara dan petugas penyelenggara pelatihan melalui magang, studi banding,

seminar, workshop dan lain-lain untuk menunjang tugas dan fungsinya; dan

- 9) Meningkatkan kapasitas SDM tersertifikasi melalui MOT dan TOC.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan berbasis IT (*e-learning* dan *blended learning*).
4. Peningkatan jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana sertifikasi kompetensi dibidang pertanian;
 - b. Menambah ruang lingkup TUK BBPP Batangkaluku;
 - c. Menyelenggarakan sertifikasi sesuai ruang lingkup TUK BBPP Batangkaluku; dan
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sertifikasi.
 5. Penguatan Kelembagaan Pertanian Swadaya (P4S) dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - a. Menumbuhkan P4S di wilayah binaan BBPP Batangkaluku (Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo);
 - b. Melakukan pembinaan P4S di wilayah binaan BBPP Batangkaluku; dan
 - c. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pengelola P4S.
 6. Pengembangan jejaring kerja sama dan kemitraan dalam dan luar negeri dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - a. Menyusun penawaran kerja sama pelatihan lintas sektor melibatkan dunia usaha dan dunia industri;
 - b. Melakukan jejaring kerjasama dan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* BBPP Batangkaluku;
 - c. Melakukan promosi produk layanan BBPP Batangkaluku;
 - d. Menjalin kerjasama untuk melaksanakan pelatihan internasional; dan
 - e. Melengkapi sarana prasarana pelatihan yang sesuai dengan standar internasional.

7. Penguatan reformasi birokrasi BBPP Batangkaluku yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk mewujudkan prinsip good governance dan clean governance dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - a. Penyediaan informasi publik secara terbuka dan mudah diakses (*website*, media, layanan informasi);
 - b. Digitalisasi layanan publik untuk memudahkan akses masyarakat;
 - c. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015
 - d. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016;
 - e. Sistem pengukuran dan evaluasi kinerja unit kerja (SAKIP);
 - f. Penguatan sistem pengawasan internal yang efektif; dan
 - g. Peningkatan sistem merit ASN, yaitu kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

D. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan dan penyesuaian regulasi yang dibutuhkan BBPP Batangkaluku untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam eksekusi strategi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dukungan regulasi memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan setiap inisiatif dan aktivitas yang diselenggarakan BBPP Batangkaluku 5 (lima) tahun ke depan.

Pada tahun 2025-2029 regulasi yang menjadi pedoman di bidang pelatihan, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
3. Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
6. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Kpts/SM.120/I/08/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Pertanian;
12. Permentan Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan ASN;
15. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di Indonesia;
16. Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 164/Kpts/SM.110/I/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Akreditasi Pelatihan Teknis Pertanian;
17. Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 168/Kpts/SM.120/I/09/2025 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan;
18. Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 129/Kpts/SM.120/I/07/2024 tentang Pedoman Evaluasi Peserta Pelatihan Pertanian;
19. Pedoman tentang Pengembangan Teknologi Pembelajaran bidang Pertanian (metode pelatihan blended); dan
20. Pedoman tentang Evaluasi Peserta Pelatihan.

E. Kerangka Kelembagaan

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diawali dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Langkah strategis perubahan tersebut melalui agenda reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan, meliputi:

1. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
2. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*;
3. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
4. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
7. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
8. *Mindset* dan *Cultural Set* Aparatur, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Aspek kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan organisasi, sampai dengan satuan kerja perangkat daerah dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai dampak dari kebijakan restrukturisasi organisasi Kementerian dan lembaga.

Aspek SDM aparatur Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis, serta penataan simplifikasi birokrasi dengan menghilangkan fungsi pejabat administrator dan pengawas sehingga terwujud aparatur BPPSDMP yang profesional dan dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

BBPP Batangkaluku memiliki fungsional khusus terdiri atas: (1) Widyaiswara; (2) Arsiparis; (3) Pustakawan; (4) Pranata Komputer; (5) Pranata Humas; (6) Perencana; (7) Analis SDM Aparatur; (8) Analis Pengelolaan Keuangan; (9) Pranata Keuangan; (10) Statistisi.

Penataan Ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada unit organisasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketatalaksanaan yang mampu menjamin efisiensi dan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan kualitas ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, penyempurnaan prosedur dan tata kerja organisasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur serta penyusunan, harmonisasi dan penyempurnaan tata hubungan kerja unit kerja lingkup BBPP Batangkaluku dan instansi terkait.

Dalam tata hubungan kerja pusat-daerah dan pengembangan SDM pertanian pasca diterapkannya otonomi daerah membutuhkan tata hubungan kerja yang dapat menjabarkan hasil pemetaan pembagian peran dan pengembangan SDM pertanian antara pusat dan daerah, sehingga tata hubungan kerja diharapkan dapat berfungsi dengan baik.

BBPP Batangkaluku memiliki rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur, serta pengaturan hubungan inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah. Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota. Penataan dan Penguatan kapasitas kelembagaan BBPP Batangkaluku ke daerah dilakukan dengan memperhatikan Kebijakan pembangunan nasional, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta peraturan perundangan terkait yang berlaku. Seiring dengan perkembangan, tantangan, dan tuntutan perubahan, baik eksternal maupun internal, maka organisasi dan tatalaksana Kementerian Pertanian harus dijalankan secara dinamis untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Kinerja BPPSDMP Tahun 2025–2029 dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran program, yaitu "Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani". Pencapaian sasaran program tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja program, yakni "Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas", dengan satuan persen (%). Target pertumbuhan yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 1% setiap tahun, mulai tahun 2025 hingga 2029. Target sebesar 1% per tahun tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi awal (*baseline*) serta kapasitas intervensi program yang tersedia. Pencapaiannya akan didukung melalui berbagai kegiatan strategis BPPSDMP yang difokuskan untuk meningkatkan kompetensi SDM dan skala usaha pelaku usaha tani. Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/202 dan B517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka Program yang diampu BPPSDMP direvisi menjadi yaitu: 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan 2) Program Dukungan Manajemen.

Pusat Pelatihan Pertanian menjabarkan program tersebut melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan pertanian yang dirumuskan kedalam 4 (empat) pilar, yaitu: (i) Peningkatan kompetensi petani; (ii) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah Pelatihan); (iii) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan); dan (iv) Peningkatan kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan. Sejalan dengan program Pusat Pelatihan Pertanian, BBPP Batangkaluku juga melaksanakan kegiatan "Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian", yang kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran strategis kegiatan, yaitu (i) Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan); (ii) Meningkatkan kepuasan peserta pelatihan terhadap

penyelenggaraan pelatihan; (iii) Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Batangkaluku; dan (iv) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Batangkaluku.

Dari keempat sasaran strategis kegiatan tersebut masing-masing telah ditentukan indikatornya untuk mengukur keberhasilannya, yaitu:

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
1.	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)
		Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)
2.	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Batangkaluku	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Batangkaluku
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Batangkaluku	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Batangkaluku

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan tersebut, BBPP Batangkaluku telah menetapkan target kinerja Tahun 2025–2029. Target kinerja tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Target kinerja BBPP Batangkaluku tahun 2025–2029

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi									
Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	SK 1	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)							
		IKSK 1.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	Persen (%)	20	18	16	14	12
		IKSK 1.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	Persen (%)	25	23	21	19	17
	SK 2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan							
		IKSK 2.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Skala Likert (1 - 5)	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
	SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Batangkaluku							
		IKSK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Batangkaluku	Nilai	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
	SK 4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan public BBPP Batangkaluku							
		IKSK 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Batangkaluku	Skala likert (1 - 4)	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64

Untuk mencapai target tersebut BBPP Batangkaluku telah menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Tahun 2025–2029 sesuai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut, adalah:

1. SK 1. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)
 - a. Melaksanakan pelatihan teknis, vokasi dan fungsional untuk aparatur;
 - b. Melaksanakan pelatihan teknis, vokasi untuk non aparatur pertanian.
2. SK 2. Meningkatkan kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan
 - a. Penyelenggaraan pelatihan teknis, vokasi dan fungsional untuk aparatur;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan teknis, vokasi untuk non aparatur pertanian;
 - c. Penyelenggaraan sertifikasi profesi di bidang pertanian;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan program dan kegiatan pelatihan;
 - e. Melaksanakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016; dan
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan.
3. SK3. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Batangkaluku
 - a. Melakukan *updating* Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan;
 - b. Melakukan *updating* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
 - c. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - d. Mengukur kinerja Balai setiap triwulan melalui penyusunan Laporan
 - e. Kinerja triwulanan;
 - f. Menyusun Laporan Tahunan Balai, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawanan pelaksanaan kegiatan selama setahun;
 - g. Melakukan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan, melalui aplikasi e-Monev Bappenas.
4. SK4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Batangkaluku
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi kegiatan;

- b. Melaksanakan pembinaan pegawai;
- c. Mengelola sistem informasi, publikasi dan promosi; dan
- d. Menyelenggarakan layanan konsultasi agribisnis dan inkubator agribisnis.

B. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja lima tahun ke depan (2025–2029) BBPP Batangkaluku telah menyusun kerangka pendanaan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian seperti tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Kerangka Pendanaan Kegiatan BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Satuan	Target					Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi														
Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	SK 1	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)												
		IKSK 1.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	Persen (%)	20	18	16	14	12					
		IKSK 1.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	Persen (%)	25	23	21	19	17					
	SK 2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan												
		IKSK 2.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Skala Likert (1 - 5)	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4					
	SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Batangkaluku												
		IKSK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Batangkaluku	Nilai	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00					
	SK 4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Batangkaluku												
		IKSK 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Batangkaluku	Skala likert (1 - 4)	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BBPP Batangkaluku tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan arah kebijakan, strategi, sasaran, serta target kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BBPP Batangkaluku dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia pertanian lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada: (i) Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029; (ii) Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP serta Pusat Pelatihan Pertanian; (iii) capaian kinerja periode sebelumnya; serta (iv) dinamika permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian yang semakin kompleks.

Tersusunnya Renstra BBPP Batangkaluku Tahun 2025–2029 ini menjadi pedoman dan arah dalam penetapan serta pelaksanaan kegiatan operasional BBPP Batangkaluku dalam mendukung pencapaian sasaran program BPPSDMP dan program strategis Kementerian Pertanian. Peran aktif BBPP Batangkaluku sangat diperlukan dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM pertanian, namun dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat, dimungkinkan masih terdapat kebijakan dan kegiatan yang memerlukan penyesuaian.

Diperlukan komitmen, integritas, dan sinergi seluruh jajaran serta pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan langkah-langkah operasional sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing. Renstra BBPP Batangkaluku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Pusat Pelatihan Pertanian dan Renstra BPPSDMP dalam mendukung terwujudnya SDM pertanian yang profesional dan berdaya saing.